



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2018



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JL. Letjend. S. Parman No. 01 PALANGKA RAYA**

Kata Pengantar

Puji dan syukur senantiasa selalu dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018, dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2018, serta Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018, dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran Visi dan Misi Pembangunan Kalimantan Tengah 2016-2021, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program kebijakan yang telah ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan kinerja ini baik tenaga maupun pikiran, diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 ini dapat bermanfaat secara optimal.

Palangka Raya, Februari 2019

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
Provinsi Kalimantan Tengah,

Ir. HERSON. B. ADEN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660206 199203 1 002

Lkhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 merupakan pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan Indikator Kinerja termuat dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan , program dan kegiatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah yang dihasilkan sesuai perjanjian kinerja tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Sasaran 1 :

Meningkatnya publikasi dan informasi pembangunan dan kegiatan pemerintahan daerah melalui media massa.

Indikator : Jumlah media publikasi yang digunakan.

Capaian kinerja sampai dengan akhir Desember 2018 adalah terpenuhinya kontrak halaman media cetak dengan 10 (sepuluh) media cetak yang dipilih secara selektif sebagai mitra media pemberitaan bagi pemerintah daerah.

b. Sasaran 2 :

Diperolehnya formulasi sistem pengembangan data dan informasi statistik sektoral secara terkoordinatif.

Indikator : Data sektoral 14 Kabupaten/ Kota.

Capaian kinerja sampai dengan akhir Desember 2018, diperolehnya 1 (satu) dokumen data sektoral kabupaten/ kota yang memuat tentang data sektoral bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan telekomunikasi.

c. Sasaran 3 :

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Pemerintahan.

Indikator : Jumlah SIM CCTV terpusat dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Capaian kinerja sampai dengan akhir Desember 2018, telah terpasang sebanyak 42 SIM CCTV terpusat yang dipasang pada kantor perangkat daerah dan titik-titik strategis. Angka tersebut telah melampaui target tahun 2018 yang ditargetkan sebanyak 30 titik, atau realisasi mencapai 140 persen.

d. Sasaran 4 :

Terbangunnya sarana dan prasarana gedung kantor yang dilengkapi dengan peralatan yang memadai.

Indikator : Persentase pembagian tahapan awal.

Capaian kinerja sampai akhir Desember 2018 telah terbangunnya 3,56 persen dari perencanaan pembangunan gedung Smart Province.

e. Sasaran 5 :

Meningkatnya pengembangan dan penyelarasan E-Government melalui optimalisasi pemanfaatan aplikasi teknologi dan informasi.

Indikator : Jumlah aplikasi yang diterapkan.

Capaian kinerja sampai dengan akhir Desember 2018 telah dibuat 5 (lima) aplikasi berbasis e-government. Aplikasi tersebut secara umum diperuntukkan untuk penyediaan informasi kewilayahan, sistem dashboard dan ringkasan informasi, Kalteng mobile berbasis android, SIM PPID, dan sistem informasi manajemen Kalteng Multimedia Warehouse Storage.

Evaluasi terhadap pencapaian kinerja serta permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian. *Pertama;* Perlu memperkuat dukungan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana, mengingat Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah adalah perangkat daerah baru dengan tugas pokok dan fungsi yang strategis. *Kedua;* Pengembangan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi adalah sebuah keniscayaan, karena Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi utama, berkaitan langsung dengan teknologi informasi.

Daftar Isi

DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Struktur Organisasi.....	2
1.2 Tugas dan Fungsi.....	3
1.3 Keadaan Pegawai.....	6
1.4 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	11
1.5 Keuangan.....	12
1.6 Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	13
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	15
2.1 Perencanaan Strategis.....	15
2.1.1 Visi dan Misi Pembangunan Daerah 2016-2021.....	16
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	17
2.1.3 Strategi dan Kebijakan.....	18
2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018.....	20
2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	21
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	22
2.5 Rencana Anggaran Tahun 2018.....	23
2.5.1 Target Belanja.....	23
2.5.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Sesuai Perjanjian Kerja 2018 ..	23
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja.....	25
3.1.1 Metode Pengukuran Kinerja.....	26

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	28
3.2.1 Indikator Kinerja : Jumlah Media Publikasi yang digunakan.	28
3.2.2 Indikator Kinerja : Data sektoral 14 Kabupaten/Kota.....	30
3.2.3 Indikator Kinerja : Jumlah SIM CCTV terpusat lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.	31
3.2.4 Indikator Kinerja : Persentase pembagian tahapan awal.....	33
3.2.5 Indikator Kinerja : Jumlah Aplikasi yang diterapkan	35
3.3 Analisis Akuntabilitas Kinerja	36
3.3.1 Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan dengan Tujuan Misi dan Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021.	36
3.3.2 Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan dengan Pencapaian Sasaran.....	37
3.4 Analisis Dampak	39
3.5 Realisasi Anggaran	42
BAB 4 PENUTUP.....	49

*D*AFTAR TABEL

Tabel 1.1	Presentase Pegawai Berdasarkan Golongan/ Ruang	7
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan per Bidang	8
Tabel 1.3	Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin	9
Tabel 1.4	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis Kebutuhan Pegawai	9
Tabel 1.5	Jumlah Sarana dan Prasarana	11
Tabel 1.6	Anggaran Belanja Tahun 2018	12
Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018	21
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2018	22
Tabel 2.3	Target Belanja Tahun 2018.....	23
Tabel 2.4	Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis	24
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat kinerja	27
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018	27
Tabel 3.3	Perbandingan antara Realisasi Capaian Kinerja dan Target para Indikator Kinerja.....	29
Tabel 3.4	Perbandingan antara Realisasi Capaian Kinerja dan Target pada Indikator Kinerja.....	31
Tabel 3.5	Perbandingan antara Realisasi Capaian Kinerja dan Target pada Indikator Kinerja.....	33
Tabel 3.6	Perbandingan antara Realisasi Capaian Kinerja dan Target pada Indikator Kinerja.....	34
Tabel 3.7	Perbandingan antara Realisasi Capaian Kinerja dan Target pada Indikator Kinerja.....	36
Tabel 3.8	Pencapaian Indikator Sasaran	37
Tabel 3.9	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2018.....	43
Tabel 3.10	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Sasaran Strategis dan yang mendukung sasaran strategis Tahun 2018	44
Tabel 3.11	Analisa Efisiensi Indikator Kinerja yang Capaiannya $\geq 100\%$	47

*D*AFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin.....	6
Grafik 1.2 Persentase Pegawai Berdasarkan Golongan.....	7
Grafik 1.3 Persentase Tingkat Pendidikan Pegawai	8
Grafik 1.4 Persentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	9
Grafik 1.5 Persentase Anggaran Tahun 2018	13
Grafik 3.1 Efektifitas Kegiatan terhadap Pencapaian dan Sasaran.....	37
Grafik 3.2 Efektifitas Kegiatan terhadap Pencapaian Sasaran Tahun 2018	38

*D*AFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tampak luar dan tampak dalam salah satu ruang : Video Wall Gedung Smart Province	34
--	----

B_{AB 1}

Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (DISKOMINFOSANTIK) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Nomor 03 tahun 2018 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Mendorong Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kinerjanya; dan
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah untuk pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

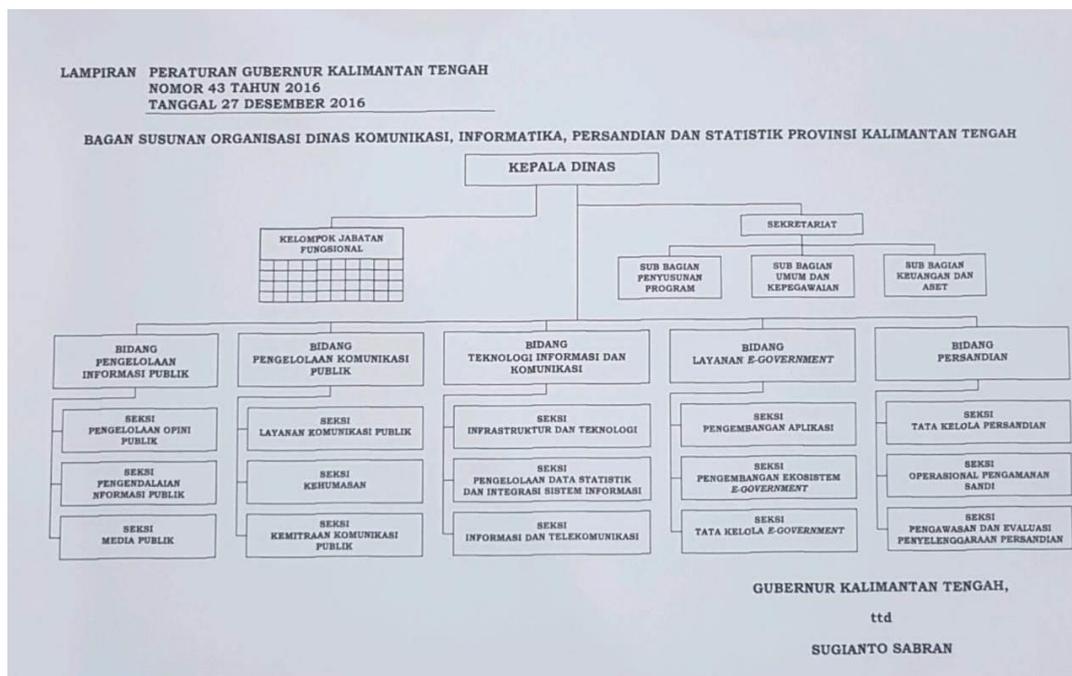
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pengelolaan Informasi Publik, terdiri dari:
 1. Seksi Pengelolaan Opini Publik
 2. Seksi Pengendalian Informasi Publik
 3. Seksi Media Publik
- d. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik , terdiri dari :
 1. Seksi Layanan Komunikasi Publik
 2. Seksi Kehumasan
 3. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik
- e. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdiri dari :
 1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi
 2. Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi
 3. Seksi Informasi dan Telekomunikasi
- f. Bidang Layanan E-Government, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Aplikasi
 2. Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government
 3. Seksi Tata Kelola E-Government

- g. Bidang Persandian, terdiri dari:
1. Seksi Tata Kelola Persandian
 2. Seksi Operasional Pengamanan Sandi
 3. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian
- h. Jabatan Fungsional terdiri dari :
1. Jabatan Fungsional Tertentu
 2. Jabatan Fungsional Umum



1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 tahun 2016 tanggal 2 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok yaitu :

“Membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik”.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok di atas, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Evaluasi, pengendalian dan pelaporan kebijakan teknis bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- c. Bimbingan teknis bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- e. Pembinaan jabatan fungsional; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian dan kedudukan tugas Pokok dan Fungsi masing- masing jenjang jabatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas, bertugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
- b) Sekretaris, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, dokumentasi peraturan perundang-undangan serta menghimpun bahan pelaporan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

Sekretaris membawahi :

1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, mempunyai tugas melaksanakan hubungan fasilitas, koordinasi, integrasi serta hubungan antar lembaga komunikasi pemerintah daerah, lembaga komunikasi sosial dan media penyiaran. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik membawahi:
1. Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik;
 2. Kepala Seksi Pengendalian Informasi Publik; dan
 3. Kepala Seksi Media Publik.
- d) Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, mempunyai tugas pembinaan, penyiapan, perumusan, pengawasan di bidang layanan informasi publik, kehumasan dan kemitraan komunikasi publik. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik membawahi :
1. Kepala Seksi Layanan Komunikasi Publik;
 2. Kepala Seksi Kehumasan; dan
 3. Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik.
- e) Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas pembinaan, penyiapan, perumusan, pelaksanaan, pengawasan dan pengkajian terhadap infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data statistik dan integrasi sistem informasi, serta informasi dan telekomunikasi. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi membawahi :
1. Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 2. Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi; dan
 3. Kepala Seksi Informasi dan Telekomunikasi.
- f) Kepala Bidang Layanan E-Government, mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pelayanan E-Government. Kepala Bidang Layanan E-Government membawahi :
1. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi;
 2. Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government; dan
 3. Kepala Seksi Tata Kelola E-Government.

g) Kepala Bidang Persandian, mempunyai tugas menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi. Kepala Bidang Persandian membawahi :

1. Kepala Seksi Tata Kelola Persandian;
2. Kepala Seksi Operasional Pengamanan Sandi; dan
3. Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.

1.3 Keadaan Pegawai

Memuat :

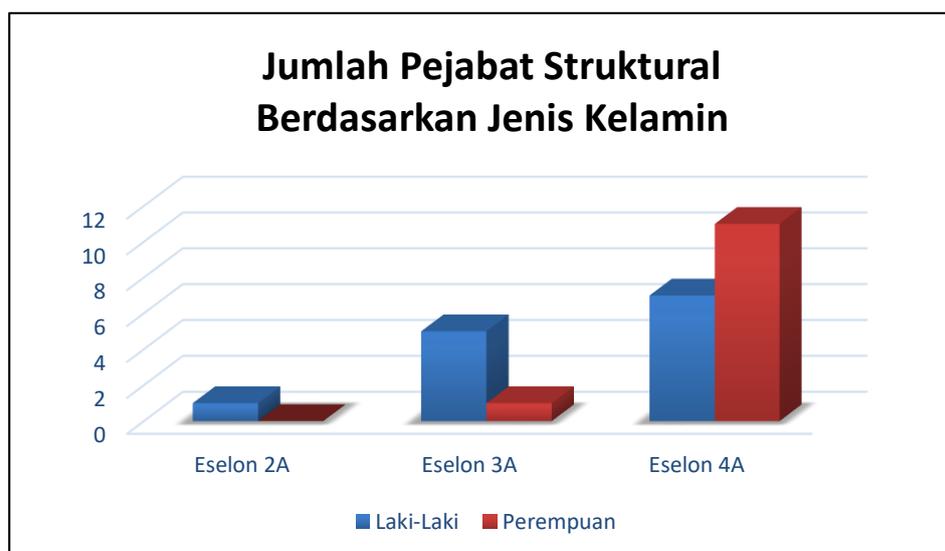
- Kondisi riil pegawai berdasarkan jabatan, golongan, tingkat pendidikan, jenis kelamin.
- Jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan.

Kondisi pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dapat diperinci berdasarkan sebagai berikut:

1. Jabatan:

- Pejabat Struktural Eselon 2A : 1 orang (1 orang laki-laki)
- Pejabat Struktural Eselon 3A : 6 orang (laki-laki 5 orang, perempuan 1 orang)
- Pejabat Struktural Eselon 4A : 18 orang (laki-laki 7 orang, perempuan 11 orang)

Grafik 1.1 Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin

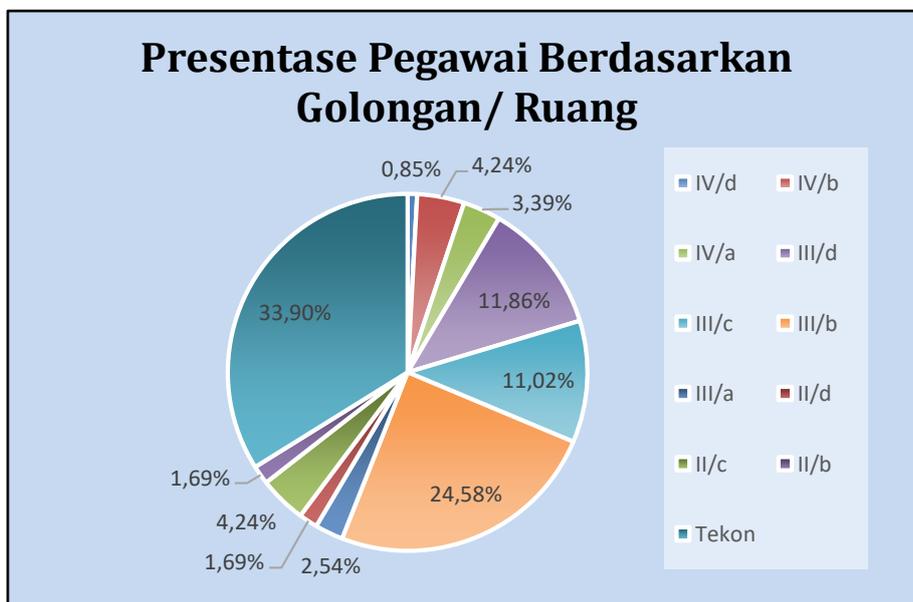


Dari postur jabatan tersebut di atas, persentase jabatan menurut jenis kelamin adalah : **52 persen** laki-laki, dan **48 persen** perempuan.

Tabel 1.1 Presentase Pegawai Berdasarkan Golongan/ Ruang

NO.	PANGKAT	GOLONGAN /RUANG	JUMLAH	%
1.	Pembina Utama Madya	IV/d	1	0,85
2.	Pembina Tk.I	IV/b	5	4,24
3.	Pembina	IV/a	4	3,39
4.	Penata Tk.I	III/d	14	11,86
5.	Penata	III/c	13	11,02
6.	Penata Muda Tk.I	III/b	29	24,58
7.	Penata Muda	III/a	3	2,54
8.	Pengatur Tk.I	II/d	2	1,69
9.	Pengatur	II/c	5	4,24
10.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	2	1,69
11.	Tenaga Kontrak	-	40	33,90
JUMLAH			118	100

Grafik 1.2 Persentase Pegawai Berdasarkan Golongan



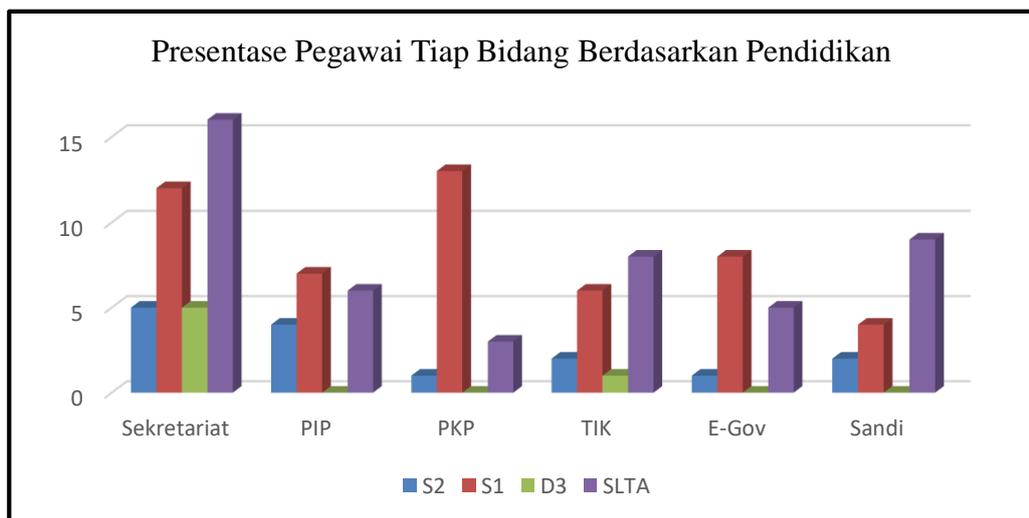
2. Tingkat Pendidikan

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan per Bidang

NO	UNIT KERJA BAG/BIDANG	S2	S1	D3	SLTA	JUMLAH
1.	Sekretariat	5	12	5	16	38
2.	Pengelolaan Informasi Publik	4	7	-	6	17
3.	Pengelolaan Komunikasi Publik	1	13	-	3	17
4.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	6	1	8	17
5.	Layanan E-Government	1	8	-	5	14
6.	Persandian	2	4	-	9	15
Jumlah		15	50	6	47	118

Persentase tingkat pendidikan pegawai : S2 sebanyak 12,71%, S1 sebanyak 42,37%, D3 sebanyak 5,08%, dan SLTA sebanyak 39,83%. Dengan demikian jenjang pendidikan terbanyak adalah S1 yaitu sebanyak 42,37%.

Grafik 1.3 Persentase Tingkat Pendidikan Pegawai



4. Jenis Kelamin

Tabel 1.3 Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PERSEN (%)
1.	Laki-laki	70	59,32
2.	Perempuan	48	40,68
Jumlah		118	100

Grafik 1.4 Persentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah dan komposisi pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dibandingkan dengan kebutuhan ideal yang seharusnya 135 orang termasuk tenaga kontrak yang sudah ada, dengan analisis kebutuhan pegawai sebagai berikut :

Tabel 1.2 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis Kebutuhan Pegawai

No.	Bidang/Seksi/Subag	Jumlah Kebutuhan		Keterangan
		Perkiraan Ideal (Orang)	Realisasi (Orang)	
1.	Kepala Dinas	1	1	Terpenuhi
2.	Sekretaris	1	1	Terpenuhi
	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	1	1	Terpenuhi
	• Jabatan Fungsional Tertentu	1	1	Terpenuhi
	• Jabatan Fungsional Umum	4	1	Kurang

	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	1	1	Terpenuhi
	• Jabatan Fungsional Umum	7	6	Kurang
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	Terpenuhi
	• Jabatan Fungsional Tertentu	1	1	Terpenuhi
	• Jabatan Fungsional Umum	5	4	Kurang
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	1	1	Terpenuhi
	Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik	1	1	Terpenuhi
	• Jabatan Fungsional Umum	3	2	Kurang
	Kepala Seksi Pengendalian Informasi Publik	1	1	Terpenuhi
	• Jabatan Fungsional Tertentu	1	1	Terpenuhi
	• Jabatan Fungsional Umum	2	2	Terpenuhi
	Kepala Seksi Media Publik	1	1	Terpenuhi
	• Jabatan Fungsional Umum	3	2	Kurang
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	1	1	Terpenuhi
	Kepala Seksi Layanan Komunikasi Publik	1	1	Terpenuhi
	• Jabatan Fungsional Umum	3	2	Kurang
	Kepala Seksi Kehumasan	1	1	Terpenuhi
	• Jabatan Fungsional Umum	4	3	Kurang
	Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik	1	1	Terpenuhi
	• Jabatan Fungsional Umum	3	2	Kurang
5.	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	1	Terpenuhi
	Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi	1	1	Terpenuhi
	• Jabatan Fungsional Umum	4	3	Kurang
	Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi	1	1	Terpenuhi
	• Jabatan Fungsional Umum	3	3	Terpenuhi
	Kepala Seksi Informasi dan Telekomunikasi	1	1	Terpenuhi

	• Jabatan Fungsional Umum	4	3	Kurang
6.	Kepala Bidang Layanan E-Government	1	1	Terpenuhi
	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi	1	1	Terpenuhi
	• Jabatan Fungsional Umum	4	3	Kurang
	Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government	1	1	Terpenuhi
	• Jabatan Fungsional Umum	3	3	Terpenuhi
	Kepala Seksi Tata Kelola E-Government	1	1	Terpenuhi
	• Jabatan Fungsional Umum	4	1	Kurang
7.	Kepala Bidang Persandian	1	1	Terpenuhi
	Kepala Seksi Tata Kelola Persandian	1	1	Terpenuhi
	• Jabatan Fungsional Umum	4	4	Terpenuhi
	Kepala Seksi Operasional Pengamanan Sandi	1	1	Terpenuhi
	• Jabatan Fungsional Umum	3	2	Kurang
	Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian	1	1	Terpenuhi
	• Jabatan Fungsional Umum	4	4	Terpenuhi
8.	Tenaga Kontrak	40	40	Terpenuhi
	JUMLAH	135	118	KURANG

Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dari data tabel di atas termasuk kategori kurang ideal, dan belum memenuhi kebutuhan pegawai ideal sesuai analisis kebutuhan, idealnya berjumlah 135 orang, namun baru terpenuhi 118 orang. Hal ini dikarenakan beberapa pegawai yang sudah purna tugas dan dikarenakan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah adalah Perangkat Daerah (PD) baru, yang sebelumnya bergabung dengan Dinas Perhubungan.

1.4 Keadaan Sarana dan Prasarana

Tabel 1.3 Jumlah Sarana dan Prasarana

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG/ UNIT
1	Tanah	
	a. Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin	
	a. Alat Alat Angkutan/transportasi	20
	b. Alat Kantor dan Rumah Tangga	653
	c. Alat Studio dan Alat Komunikasi	265
	d. Alat keamanan	46
3	Gedung dan Bangunan	
	a. Bangunan Gedung Kantor	1
	b. Bangunan pendukung	7
4	Instalasi dan Jaringan	
	a. Instalasi	7
	b. Jaringan komunikasi/TIK	5
5	Aset Tetap Lainnya	
	a. Aplikasi Perkantoran	1
JUMLAH		1.006

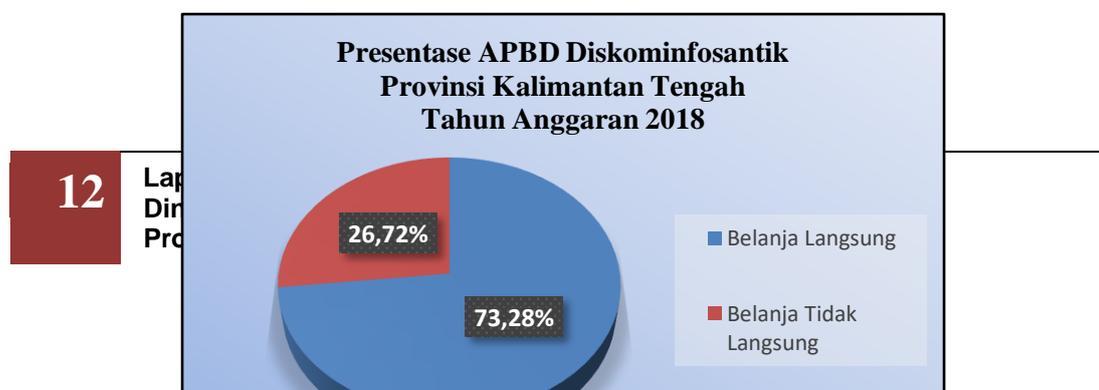
1.5 Keuangan

Anggaran tahun 2018 yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah bersumber pada APBD yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 1.4 Anggaran Belanja Tahun 2018

NO.	BELANJA LANGSUNG/ BELANJA TIDAK LANGSUNG	BESARAN ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
1	Belanja Langsung	27.128.711.978,-	73,28%
2	Belanja Tidak Langsung	9.891.243.678,-	26,72%
	Total APBD	37.019.955.656,-	100 %

Grafik 1.2 Persentase Anggaran Tahun 2018



Anggaran Belanja Langsung digunakan untuk membiayai 15 program dan 68 kegiatan.

1.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauhmana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP, manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Potensi yang menjadi ruang lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dan Sistematika penulisan LKIP.

BAB 2 : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran

secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi pembangunan Kalimantan Tengah.

BAB 3 : AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB 4 : PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

B_{AB 2}

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

2.1 Perencanaan Strategis

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah adalah perangkat daerah yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016. Sebagai perangkat daerah baru, tentu memiliki tantangan serta kendala yang harus dihadapi. Visi dan misi Kepala Daerah, yang selanjutnya menjadi Visi dan Misi Pembangunan Kalimantan Tengah kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2016 hingga tahun 2021 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mutlak menjadi acuan, rujukan dan tujuan semua perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan.

Visi dan misi pembangunan Kalimantan Tengah tersebut, memiliki keterkaitan dan konsistensi yang kuat dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2005-2025. Visi Pembangunan Kalimantan Tengah adalah “ *Kalimantan Tengah Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)*”. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan.

Guna merealisasikan visi dan misi dimaksud, terdapat 11 (sebelas) arah kebijakan pembangunan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, : (1) Penyediaan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi masyarakat, (2) Sosialisasi penggunaan internet secara sehat, (3) Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan TIK, (4) Kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan TIK, (5) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas unit kerja dalam pelayanan publik, (6) Menyusun regulasi (Peraturan Gubernur) agar masterplan e-government menjadi acuan seluruh perangkat daerah Provinsi Kalimantan

Tengah untuk membangun TIK melalui e-government, (7) Melaksanakan studi kelayakan/studi banding dalam rangka pengembangan dan optimalisasi penerapan e-government di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (8) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang TIK (9) Menyelenggarakan penilaian dan pembinaan kepada masyarakat dan komunitas berbasis TIK di Provinsi Kalimantan Tengah (10) Melaksanakan optimalisasi penyebarluasan informasi kepada masyarakat dalam mendukung keterbukaan informasi publik, dan (11) Meningkatkan kerjasama dengan media massa dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

2.1.1 Visi dan Misi Pembangunan Daerah 2016-2021

Visi

“ Kalimantan Tengah Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis) ”.

Misi

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Pengelolaan Infrastruktur;
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai;
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan;
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah;
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata;
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; dan
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Dari 8 (delapan) misi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan tujuan misi ke 5 (lima) yaitu Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah, untuk terwujudnya masyarakat Kalimantan Tengah yang maju, berbasis teknologi informatika dan komunikasi.

Dalam RPJMD dituangkan secara jelas bahwa keberhasilan suatu bangsa atau daerah, sangat erat kaitannya dengan keunggulan sumber daya manusia yang meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi dan social budaya masyarakatnya. Lebih lanjut diuraikan bahwa perkembangan teknologi saat

ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global, sehingga masyarakat Kalimantan Tengah harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dan hasil implikasi langsung perkembangan teknologi.

Beranjak dari hal tersebut di atas, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah kurun waktu 5 (lima) tahun yang tertuang dalam rencana Strategis 2016-2021.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi pembangunan yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dari pembangunan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik di Kalimantan Tengah pada kurun waktu 5 (lima) tahun 2016-2021

Tujuan :

- a. Tersedianya pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur bidang TIK, Sandi dan Statistik;
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana bidang teknologi informasi, komunikasi, sandi dan statistik;
- d. Meningkatkan layanan online dalam penyelenggaraan berbasis TIK;
- e. Meningkatkan peran serta semua stakeholder dalam pembangunan TIK;
- f. Mengoptimalkan pengelolaan data dan pemanfaatan sarana komunikasi.

Sasaran Strategis :

- a. Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik;
- b. Tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi bidang TIK, sandi dan statistik;
- c. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai;
- d. Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi secara online yang terintegrasi dalam pelayanan publik;
- e. Terwujudnya masyarakat berbasis TIK; dan

- f. Tersebar nya informasi berbasis TIK.

2.1.3 Strategi dan Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran yang didasarkan pada misi, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi dan kebijakan, program dan kegiatan.

Sektor :

Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Strategi :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi kepada masyarakat;
- b. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap situs-situs yang kurang mendidik.

Kebijakan :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana TIK bagi masyarakat;
- b. Sosialisasi penggunaan internet secara sehat.

Sektor :

Peningkatan SDM Aparatur Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Strategi :

- a. Memberikan pelatihan bagi aparatur secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan TIK;
- b. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur dalam bidang TIK, Sandi dan Statistik;

Kebijakan :

- a. Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan/bimtek TIK;
- b. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan TIK.

Sektor :

Peningkatan Sarana Prasarana Bidang Informasi dan Komunikasi.

Strategi :

- a. Menyediakan sarana prasarana infrastruktur dan teknologi tinggi yang memadai.

Kebijakan :

- a. Meningkatkan kualitas unit kerja, serta pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi tepat guna

Sektor :

Optimalisasi penerapan e-government.

Strategi :

- a. Menyusun rencana induk e-government (Masterplan E-Government);
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendukung penerapan e-government di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Kebijakan :

- a. Menyusun regulasi (Peraturan Gubernur) agar masterplan e-government menjadi acuan seluruh perangkat daerah dalam membangun TIK melalui e-government;
- b. Melaksanakan studi kelayakan/banding dalam rangka pengembangan dan optimalisasi penerapan e-government di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Sektor :

Peningkatan kerjasama kemitraan masyarakat, pemerintah dan swasta

Strategi :

- a. Meningkatkan kualitas pengetahuan masyarakat dalam bidang TI;
- b. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di Kalimantan Tengah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Kebijakan :

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang TIK;
- b. Menyelenggarakan penilaian dan pembinaan kepada masyarakat dan komunitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Provinsi Kalimantan Tengah.

Sektor :

Peningkatan kualitas dan kuantitas informasi melalui Media.

Strategi :

- a. Meningkatkan desiminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi;
- b. Melakukan kerjasama dengan media massa.

Kebijakan :

- a. Melaksanakan optimalisasi penyebarluasan informasi kepada masyarakat dalam mendukung keterbukaan informasi publik;
- b. Meningkatkan kerjasama dengan media massa dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018

Untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan dalam mencapai sasaran strategis 2016-2021, Sasaran dan IKU 2018 ditetapkan sesuai kebutuhan utama dengan tetap mengacu kepada sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021. Khusus mengenai sasaran, dengan mempertimbangkan urgensi tujuan yang harus dicapai oleh perangkat daerah baru, maka dirumuskan sasaran tahun 2019 yang lebih bersifat urgent, khusus dan substantif dengan tetap mengacu kepada sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Startegis (RENSTRA) yang diuraikan sebagai berikut :

1. **Sasaran 1** : Meningkatnya publikasi dan informasi pembangunan dan kegiatan pemerintah daerah melalui media massa, mengacu kepada sasaran strategis tersebarnya informasi berbasis TIK, dengan strategi melakukan kerjasama dengan media massa.
2. **Sasaran 2** : Diperolehnya formulasi sistem pengembangan data dan informasi statistik sektoral secara terkoordinatif, mengacu kepada sasaran strategis tersebarnya informasi berbasis TIK, dengan strategi meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi.
3. **Sasaran 3** : Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan, mengacu kepada sasaran strategis

terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, dengan strategi menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.

4. **Sasaran 4** : Terbangunnya sarana dan prasarana gedung kantor yang dilengkapi dengan peralatan yang memadai, mengacu kepada sasaran strategis terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, dengan strategi menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
5. **Sasaran 5** : Meningkatnya pengembangan dan penyelarasan e-government melalui optimalisasi pemanfaatan aplikasi teknologi dan informasi, mengacu kepada sasaran strategis meningkatnya ketersediaan teknologi informasi secara online yang terintegrasi dalam pelayanan publik, dengan strategi meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendukung penerapan e-government Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah diuraikan pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET REALISASI %
1	2	3	4	
1.	Meningkatnya publikasi dan informasi pembangunan dan kegiatan pemerintahan daerah melalui media massa	Jumlah media publikasi yang digunakan	10 media	100
2.	Diperolehnya formulasi sistem pengembangan data dan informasi statistik sektoral secara terkoordinatif	Data sektoral 14 Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	100
3.	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah SIM CCTV terpusat dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	30 SKPD/titik	100

4.	Terbangunnya sarana dan prasarana gedung kantor yang dilengkapi dengan peralatan yang memadai	Persentase pembagian tahapan awal	3,56%	100
5.	Meningkatnya pengembangan dan penyelarasan E-Government melalui optimalisasi pemanfaatan aplikasi teknologi dan informasi	Jumlah aplikasi yang diterapkan	5 Aplikasi	100

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut adalah Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2018 :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya publikasi dan informasi pembangunan dan kegiatan Pemerintahan Daerah melalui media massa	Jumlah media publikasi yang digunakan	10 media
2.	Diperolehnya formulasi sistem pengembangan data dan informasi statistik sektoral secara terkoordinatif	Data sektoral 14 Kabupaten/Kota	1 Dokumen
3.	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah SIM CCTV terpusat dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	30 Instansi

4.	Terbangunnya sarana dan prasarana gedung kantor yang dilengkapi dengan peralatan yang memadai	Persentase pembagian tahapan awal	3,56%
5.	Meningkatnya pengembangan dan penyelarasan E-Government melalui optimalisasi pemanfaatan aplikasi teknologi dan informasi	Jumlah aplikasi yang diterapkan	5 Aplikasi

2.5 Rencana Anggaran Tahun 2018

Pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan dengan anggaran APBD sebesar Rp. 37.019.955.656,- dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp. 9.891.243.678,- dan belanja langsung sebesar Rp. 27.128.711.978,-

2.5.1 Target Belanja

Tabel 2.3 Target Belanja Tahun 2018

URAIAN	TARGET	PROSENTASEE
Belanja Tidak Langsung	9.891.243.678,-	26,72%
Belanja Langsung	27.128,711.978,-	73,28%
Jumlah	37.019.955.656,-.	100%

2.5.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Sesuai Perjanjian Kerja 2018

Anggaran belanja langsung Tahun 2018 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis sesuai PK 2018 adalah sebagai berikut : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 mengampu 15 Program dan 68 kegiatan . Program utama dalam pencapaian sasaran ada 5 (lima) program sedangkan 10 (sepuluh) program sebagai pendukung. Anggaran program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran utama sebesar Rp. 8.305.600.000,- dan anggaran untuk program pendukung pencapaian sasaran sebesar Rp. 18.823.111.978,-

Tabel 2.4 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

NO.	SASARAN	ANGGARAN (RP)	PERSENTASE
1.	Meningkatnya publikasi dan informasi pembangunan dan kegiatan Pemerintahan Daerah melalui media massa	3.672.000.000,-	44,21
2	Diperolehnya formulasi sistem pengembangan data dan informasi statistik sektoral secara terkoordinatif	284.000.000,-	3,42
3.	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Pemerintahan	902.150.000,-	10,86
4.	Terbangunnya sarana dan prasarana gedung kantor yang dilengkapi dengan peralatan yang memadai	2.500.000.000,-	30,10
5.	Meningkatnya pengembangan dan penyelarasan E-Government melalui optimalisasi pemanfaatan aplikasi teknologi dan informasi	947.450.000,-	11,41

B_{AB 3}

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima. Media pertanggungjawaban tersebut adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan pelaporan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Media pertanggungjawaban tersebut meliputi pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Dalam mengukur kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, telah diidentifikasi berbagai komponen indikator, dimana dalam kegiatan-kegiatan tahun 2018 sebagian besar indikatornya memiliki cakupan indikator kinerja yaitu input, output, dan outcome.

3.1.1 Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat kinerja

NO.	KATEGORI	RENTANG NILAI	KODE
1.	Sangat Baik	$91 \leq 100$	Hijau Tua
2.	Tinggi	$76 \leq 90$	Hijau Muda
3.	Sedang	$66 \leq 75$	Kuning Tua
4.	Rendah	$51 \leq 65$	Kuning Muda
5.	Sangat Rendah	≤ 50	Merah

❖ Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 5 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI			KATEGORI
					CAPAIAN KINERJA		%	
	Meningkatnya publikasi dan informasi pembangunan dan kegiatan Pemerintahan Daerah melalui media massa	Jumlah media publikasi yang digunakan	10	Media	10	Media	100	SANGAT BAIK
2.	Diperolehnya formulasi sistem pengembangan data dan informasi statistik sektoral secara terkoordinatif	Data sektoral 14 Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	100	SANGAT BAIK
3.	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah SIM CCTV terpusat lingkup Pemprov Kalteng	30	SKPD/titik	42	SKPD	140	SANGAT BAIK
4.	Terbangunnya sarana dan prasarana gedung kantor yang dilengkapi dengan peralatan yang memadai	Persentase pembagian tahapan awal	3,56	persen	3,56	persen	100	SANGAT BAIK

5.	Meningkatnya pengembangan dan penyelarasan E-Government melalui optimalisasi pemanfaatan aplikasi teknologi dan informasi	Jumlah aplikasi yang diterapkan	5	Aplikasi	5	Aplikasi	100	SANGAT BAIK
----	---	---------------------------------	---	----------	---	----------	-----	-------------

Dari tabel di atas, terdapat 5 (lima) indikator yang terbagi ke dalam 5 (lima) sasaran. Pada tahun 2018, 5 (lima) indikator tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100% dari total indikator. Sementara itu, tidak ada indikator yang tidak memenuhi target. Capaian yang tertinggi pada indikator Jumlah SIM CCTV terpusat lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu sebesar 140%.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

SASARAN 1

Meningkatnya publikasi dan informasi pembangunan dan kegiatan Pemerintahan Daerah melalui media massa.

3.2.1 Indikator Kinerja : Jumlah Media Publikasi yang digunakan.

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada perbandingan antara Realisasi Capaian Kinerja dan Target. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Kerjasama Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan kontrak halaman media cetak. Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 3.672.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.670.188.127,- atau 99,9%.

Keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, didukung tingginya komitmen dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat, dengan pemanfaatan kemitraan yang baik dengan media massa yang dipilih secara selektif dan efektif, dengan mempertimbangkan jangkauan

sasaran dan karakteristik media yang digunakan. 10 (sepuluh) media dimaksud adalah :

- a. Harian Kalteng Pos;
- b. Harian Tabengan;
- c. Harian Radar Sampit/ Palangka
- d. Harian Palangka Post
- e. Harian Dayak Pos
- f. Palangka Ekspres
- g. Media Kalteng
- h. Introgator
- i. Koran Bidik
- j. Kabar Kalteng

Capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 6 Perbandingan antara Realisasi Capaian Kinerja dan Target para Indikator Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Ket
		Media	Capaian Kinerja (Media)	%	
Meningkatnya publikasi dan informasi pembangunan dan kegiatan Pemerintahan Daerah melalui media massa	Jumlah Media Publikasi yang digunakan	10	10	100	Sangat Baik

Dilihat dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa capaian pada tahun 2018 sesuai target yang telah ditetapkan.

SASARAN 2

Diperolehnya formulasi sistem pengembangan data dan informasi statistik sektoral secara terkoordinatif

3.2.2 Indikator Kinerja : Data sektoral 14 Kabupaten/Kota.

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada perbandingan antara realisasi capaian kinerja dengan Target. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah, dengan 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral serta kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Sektoral. Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 2 (dua) kegiatan untuk mewujudkan sasaran tersebut sebesar Rp. 284.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 273.820.580,- atau 96,4 %.

Data sektoral Kabupaten/Kota diperoleh melalui sinergitas data Perangkat Daerah Provinsi dengan Perangkat Daerah Kabupaten / Kota se-Kalimantan Tengah secara hierarkhis. Formulasi Data Sektoral yang diperoleh memuat informasi :

- a. Data Kependidikan;
- b. Data Kependudukan;
- c. Data Sektor Perhubungan;
- d. Ketenagakerjaan;
- e. Kesehatan;
- f. Telekomunikasi.

Capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan antara Realisasi Capaian Kinerja dan Target pada Indikator Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Ket
		(Dokumen)	Capaian Kinerja (Dokumen)	%	
Diperolehnya formulasi sistem pengembangan data dan informasi statistik sektoral secara terkoordinatif	Data sektoral 14 Kabupaten/Kota	1	1	100	Sangat Baik

Dilihat dari tabel 3.4 tersebut di atas, dapat dilihat bahwa capaian pada tahun 2018 sesuai target yang telah ditetapkan.

SASARAN 3

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Pemerintahan

3.2.3 Indikator Kinerja : Jumlah SIM CCTV terpusat lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada perbandingan antara Realisasi Capaian Kinerja dan Target. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan Pembuatan SIM CCTV terpusat lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 untuk mewujudkan sasaran tersebut sebesar Rp 902.150.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 896.825.000,- atau 99,4 %.

Pencapaian Indikator Kinerja dimaksud merupakan cerminan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, untuk melengkapi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan dengan efektif, salah satunya melalui program strategis pemasangan SIM CCTV

terpusat, dan pada tahun 2018 telah ditargetkan sebanyak 30 SKPD dan / atau 30 titik terpasang di tempat strategis yang terkoneksi secara terpusat, realisasi terpasang pada 42 titik sebagai berikut:

1. Kantor Samsat Palangka Raya 2 titik.
2. Kantor Samsat Kapuas 4 titik.
3. Kantor Samsat Pulang Pisau 2 titik.
4. Kantor Samsat Kasongan 4 titik.
5. Kantor Samsat Sampit 4 titik.
6. Kantor Samsat Pangkalan Bun 4 titik.
7. Kantor Samsat Buntok 2 titik.
8. Kantor Samsat Muara Teweh 4 titik.
9. Dinas KominfoSantik Prov. Kalteng 1 titik.
10. Vitron depan Istana Isen Mulang 1 titik.
11. Vitron Kapuas 1 titik.
12. Vitron Sampit 1 titik.
13. Dermaga Muara Teweh 1 titik.
14. Dermaga Pasar Lama Buntok 1 titik.
15. Dermaga Danau Mare Kapuas 1 titik.
16. Dermaga penyebrangan Sampit - Seranau 1 titik.
17. Demaga LLASD Habaring Hurung Sampit 1 titik.
18. Terminal kedatangan pelabuhan laut Sampit 1 titik.
19. Bundaran KB Sampit 1 titik.
20. Simpang Samsat – Rumah Sakit Pangkalan Bun 1 titik.
21. Dermaga Pariwisata Kumai Pangkalan Bun 1 titik.
22. Bundaran Pancasila Pangkalan Bun 1 titik.
23. Terminal Natai Sukai 1 titik.
24. Taman Laut Pulang Pisau 1 titik.

Tabel 3.5 Perbandingan antara Realisasi Capaian Kinerja dan Target pada Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (SKPD)	Realisasi		Ket
			Capaian Kinerja (titik)	%	
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah SIM CCTV terpusat lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	30	42	140	Sangat Baik

Dilihat dari tabel 3.5 tersebut di atas, dapat dilihat bahwa capaian pada tahun 2018 sesuai target yang telah ditetapkan.

SASARAN 4

Terbangunnya sarana dan prasarana gedung kantor yang dilengkapi dengan peralatan yang memadai.

3.2.4 Indikator Kinerja : Persentase pembagian tahapan awal.

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada perbandingan antara Realisasi Capaian Kinerja dan Target. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan pembangunan gedung Smart Province. Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 untuk mewujudkan sasaran tersebut sebesar Rp. 2.500.000.000,- atau 3,56 persen pembangunan dari total anggaran kebutuhan utama sebesar Rp. 8.900.000.000,- (diluar kebutuhan bangunan pendukung) dengan realisasi sebesar Rp. 2.448.800.000,- atau 97,9 %.

Pencapaian Indikator Kinerja dimaksud merupakan pembangunan tahap awal dari pembangunan gedung Smart Province sebesar 3,56 % dari perencanaan. Hasil capaian pembangunan yang telah dicapai pada tahap awal mencakup : Bangunan 2 (dua) lantai, dengan penempatan sarana utama di lantai 2 dengan kapasitas 6 ruangan yang diantaranya diperuntukan sebagai

ruang command center dan data center serta perlengkapan teknologi pendukung lainnya.

Gambar 3.1 Tampak luar dan tampak dalam salah satu ruang : Video Wall Gedung Smart Province



Tabel 3.6 Perbandingan antara Realisasi Capaian Kinerja dan Target pada Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Ket
		(Persentase)	Capaian Kinerja	%	
Terbangunnya sarana dan prasarana gedung kantor yang dilengkapi dengan peralatan yang memadai	Persentase pembagian tahap awal	3,56	3,56	100	Sangat Baik

Dilihat dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa capaian pada tahun 2018 sesuai target yang telah ditetapkan.

SASARAN 5

Meningkatnya pengembangan dan penyelarasan E-Government melalui optimalisasi pemanfaatan aplikasi teknologi dan informasi.

3.2.5 Indikator Kinerja : Jumlah Aplikasi yang diterapkan

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada perbandingan antara Realisasi Capaian Kinerja dan Target. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 untuk mewujudkan sasaran tersebut sebesar Rp. 947.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 929.716.000,- atau 98,1 %.

Pencapaian Indikator Kinerja dimaksud merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menuju Smart Province yang didukung oleh aplikasi pelayanan berteknologi tinggi, untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. 5 (lima) aplikasi tersebut adalah :

1. Sistem Informasi Manajemen Pusat Informasi Spasial Daerah (PISDA), pemanfaatannya untuk Penyediaan informasi/ data peta kewilayahan Provinsi Kalimantan Tengah berbasis peta atau spasial.
2. Sistem Dashboard dan ringkasan informasi, pemanfaatannya untuk rekapitulasi capaian kinerja, perencanaan, pendapatan, penyerapan anggaran, rencana umum pengadaan dan sistem monitoring TEPR di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Sistem Informasi Manajemen Portal dan Kalteng Mobile, pemanfaatannya untuk memudahkan dalam memperoleh informasi seputar Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat di akses melalui smartphone berbasis android.
4. Sistem Informasi Manajemen Pejabat Pengelola Informasi Daerah (SIM PPID), pemanfaatannya untuk pengaduan yang terhubung secara langsung dengan lapor.go.id
5. Sistem Informasi Manajemen Kalteng Multimedia Warehouse Storage dan Kalteng SMS Gateway.

Tabel 3.7 Perbandingan antara Realisasi Capaian Kinerja dan Target pada Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Ket
		(Aplikasi)	Capaian Kinerja	%	
Meningkatnya pengembangan dan penyelarasan E-Government melalui optimalisasi pemanfaatan aplikasi teknologi dan informasi	Jumlah Aplikasi yang diterapkan	5	5	100	Baik

Dilihat dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa capaian pada tahun 2018 sesuai target yang telah ditetapkan.

3.3 Analisis Akuntabilitas Kinerja

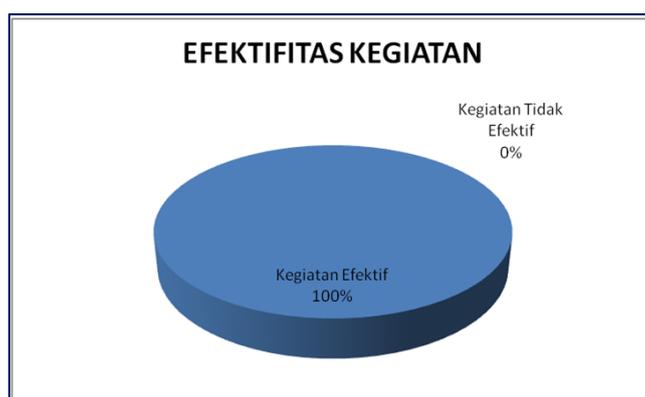
Laporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana ditunjukkan dalam pengukuran dan evaluasi kinerja seperti tersebut diatas, melainkan juga menyajikan informasi relevan lainnya agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

3.3.1 Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan dengan Tujuan Misi dan Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dituangkan pada 15 program dan 68 kegiatan pada tahun 2018 yang telah selaras dengan Visi dan Misi Pembangunan Kalimantan Tengah, khususnya penjabaran misi ke 5 pemantapan tata kelola pemerintahan daerah, melalui sektor pembangunan dan pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK). artinya terdapat keterkaitan yang erat antara pencapaian indikator kinerja dengan Visi dan Misi Pembangunan Kalimantan Tengah tahun 2016-2021.

Hal tersebut ditunjukkan oleh tingkat efektifitas capaian outcome dari seluruh kegiatan sebesar 100 % dinyatakan telah berhasil dalam upaya pencapaian tujuan akhir pelaksanaan program. Gambaran tingkat efektifitas capaian outcome dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2018 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.1 Efektifitas Kegiatan terhadap Pencapaian dan Sasaran



3.3.2 Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan dengan Pencapaian Sasaran

Setiap Program dan kegiatan yang dilaksanakan dimaksudkan untuk mewujudkan sasaran strategis dan sasaran 2018 yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam perumusan pencapaian indikator kinerja kegiatan harus diarahkan dan selaras dengan pencapaian sasaran. Adapun sasaran yang dapat dicapai pada Tahun 2018 melalui Program dan Kegiatan yang sudah dilaksanakan menunjukkan bahwa pencapaian kinerja kegiatan berhasil sebesar 100,00 %. Indikator keberhasilan tersebut diukur melalui indikator sasaran sebagaimana dalam tabel berikut ini :

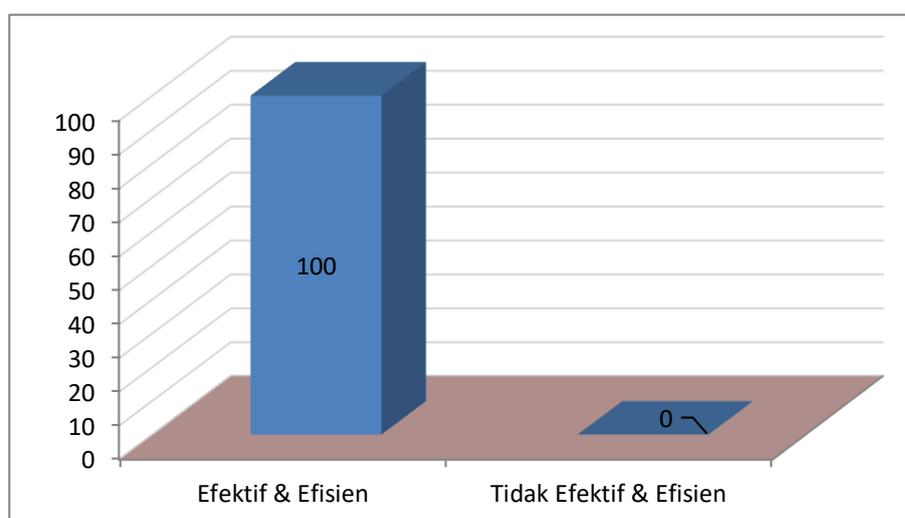
Tabel 3.8 Pencapaian Indikator Sasaran

No	Sasaran Startegis	Indikator kinerja	Target		Realisasi		
					Capaian Kinerja		%
1.	Meningkatnya publikasi dan informasi pembangunan dan kegiatan Pemerintahan Daerah melalui media massa	Jumlah media publikasi yang digunakan	10	Media	10	Media	100

2.	Diperolehnya formulasi sistem pengembangan data dan informasi statistik sektoral secara terkoordinatif	Data sektoral 14 Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	100
3.	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah SIM CCTV terpusat lingkup Pemprov Kalteng	30	SKPD/titik	42	SKPD/titik	140
4.	Terbangunnya sarana dan prasarana gedung kantor yang dilengkapi dengan peralatan yang memadai	Persentase pembagian tahapan awal	3,56	persen	3,56	persen	100
5.	Meningkatnya pengembangan dan penyelarasan E-Government melalui optimalisasi pemanfaatan aplikasi teknologi dan informasi	Jumlah aplikasi yang diterapkan	5	Aplikasi	5	Aplikasi	100

Berdasarkan data hasil evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan bahwa 6 kegiatan (**100 %**) efektif dalam mewujudkan sasaran juga sangat efisien dalam penggunaan input untuk menghasilkan output sesuai yang direncanakan. Hal ini dapat digambarkan sebagaimana pada grafik berikut ini :

Grafik 3.2 Efektifitas Kegiatan terhadap Pencapaian Sasaran Tahun 2018



3.4 Analisis Dampak

Analisis dampak merupakan suatu telaahan atau kajian mengenai dampak atau pengaruh suatu kegiatan yang dilaksanakan terhadap kehidupan sosial manusia dan lingkungan sekitarnya. Dengan mengetahui dampak dari sasaran dan indikator kinerja yang telah dilaksanakan maka suatu kegiatan dapat ditentukan tingkat keberhasilan, manfaat maupun kegagalan sebuah program dan kegiatan.

Pada Sub Bab ini akan dibahas mengenai dampak dari sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah direncanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Sasaran 1 :

Meningkatnya publikasi dan informasi pembangunan dan kegiatan Pemerintahan Daerah melalui media massa.

Inti dan substansi kegiatan ini adalah penyebarluasan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat melalui kemitraan dengan media massa. Pemilihan media secara selektif memegang peranan penting dalam menjalin kemitraan, karena menyangkut pangsa pasar media, jangkauan, serta karakteristik media itu sendiri yang akan menentukan, dan pada akhirnya terbentuk opini penerima informasi ketika sebuah informasi itu disebarluaskan.

Pilihan bermitra dengan 10 (sepuluh) media cetak berupa kontrak halaman, sudah melalui kajian dan telaahan terhadap masing-masing katektiristik media tersebut beserta keunggulannya. Output kegiatan ini akan mampu menjembatani komunikasi pemerintah daerah dengan masyarakat untuk memperoleh informasi yang objektif dan beragam tentang apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membangun semua aspek, khususnya aspek yang bersentuhan langsung kepada kesejahteraan masyarakat.

Manfaat yang diperoleh atau outcome bagi pemerintah daerah sendiri adalah dengan tersampainya informasi kepada masyarakat secara objektif, potensi munculnya dampak sosial kemasyarakatan berupa ketidakpuasan, ketidakadilan, dan ketidakseimbangan makin kecil, karena masyarakat telah memahami dengan utuh melalui pemberitaan terkait konsep dan pelaksanaan

pembangunan, sehingga masyarakat akan terlibat aktif dalam pembangunan itu sendiri bahkan dalam pengawasannya.

Keseimbangan pemberitaan dan stigma positif bagi pemerintah daerah melalui kemitraan media massa ini merupakan kata kunci dari pelaksanaan kegiatan ini, karena sebegus apapun dan / atau keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintah daerah, tidak akan berarti apa-apa, apabila tidak diimbangi informasi yang promotif terhadap keberhasilan tersebut.

2. **Sasaran 2 :**

Diperolehnya formulasi sistem pengembangan data dan informasi statistik sektoral secara terkoordinatif.

Data Statistik Sektoral sangat penting dan strategis untuk menopang data BPS yang dikemas secara umum. Data Sektoral lebih ditekankan kepada data-data sektor strategis yang dirumuskan secara detail, sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah. Data kependidikan misalnya dikemas dengan data keberadaan guru, jumlah sekolah, hingga lokasi sekolah, begitupun halnya tentang kependudukan, perhubungan, telekomunikasi hingga data tentang ketenagakerjaan.

Output dari kegiatan ini adalah diperolehnya data sektoral statistik yang update dari kabupaten/kota yang dilakukan secara parsial per sektor yang selanjutnya dikompilasi. Manfaat atau outcome bagi pemerintah daerah, data tersebut digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan strategis dalam pembangunan, sehingga kebijakan pemerintah menjadi terarah.

3. **Sasaran 3 :**

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai. Pada era teknologi saat ini, penggunaan dan pemanfaatan teknologi menjadi bagian terpenting. Pemasangan CCTV pada titik-titik strategis dilingkungan pelayanan umum dan pelayanan masyarakat serta di kantor-kantor pemerintah, merupakan terobosan yang tepat, terlebih

CCTV dimaksud terintegrasi dan terpusat, sehingga efektifitas pemantauan dan monitoring dapat dilakukan secara murah, efektif dan efisien, sebagaimana hakikat penggunaan anggaran yang hemat namun bermanfaat.

Output kegiatan ini adalah pemasangan CCTV terintegrasi pada titik-titik strategis, baik di lingkup SKPD maupun titik-titik pelayanan umum dan strategis lainnya. Manfaat atau outcome bagi pemerintah daerah adalah efisiensi dan efektifitas dalam pengawasan dan monitoring kegiatan pemerintah daerah dan sektor pelayanan bagi masyarakat.

4. Sasaran 4 :

Terbangunnya sarana dan prasarana gedung kantor yang dilengkapi dengan peralatan yang memadai.

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016, yang artinya Perangkat daerah ini baru berdiri kurang lebih 2 (dua) tahun. Keadaan demikian tentunya perlengkapan gedung Kantor masih belum memadai, karena masih bergabung dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah. Pembangunan Gedung Kantor merupakan hal yang mutlak harus dilakukan sebagai sarana pendukung utama penyelenggaraan pemerintahan. Pembangunan Gedung Kantor Smart Province, disamping fungsi utama tempat bekerja sebagai implementasi struktur, tetapi juga dilengkapi dengan sarana dan perangkat berteknologi tinggi untuk mewujudkan Smart Province.

Dengan pembangunan gedung ini, diharapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bisa berjalan optimal dan maksimal. Output kegiatan ini adalah terbangunnya tahap awal gedung kantor Smart Province sebanyak 3,56 persen dari perencanaan. Sedangkan manfaat atau outcome bagi pemerintah daerah adalah efektifitas dan efisiensi pelayanan, karena semua pelayanan akan ditunjang teknologi tinggi. Semua aspek pada saatnya akan dilakukan secara online, sehingga penyelenggaraan pemerintahan benar-benar efektif, murah dan tepat guna.

5. Sasaran 5 :

Meningkatnya pengembangan dan penyelarasan E-Government melalui optimalisasi pemanfaatan aplikasi teknologi dan informasi.

Salah satu tujuan dari reformasi birokrasi adalah adalah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, efektif dan efisien. Untuk menjalankan E-Government diperlukan suatu sistem informasi yang baik, teratur dan sinergi dari masing-masing lembaga pemerintahan, sehingga dari kesemuanya itu bisa didapatkan suatu sistem informasi yang terjalin dengan baik.

E-government adalah sistem pemerintahan yang berbasis teknologi komunikasi. Pada prinsipnya inovasi *e-government* ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan *online*. Selain itu, melalui sistem *e-government*, masyarakat bisa ikut mengontrol fungsi pemerintah.

Saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, setahap demi setahap mengembangkan sistem *e-government*, sehingga pada akhirnya semua aspek penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan berbasis teknologi, seperti : *e-budgeting*, *e-procurement*, *e-audit*, *e-catalog*, *e-payment*, *e-controlling*, bahkan hingga *e-health*.

Output pengembangan 5 (lima) aplikasi pelayanan pada tahun 2018, pada hakekatnya adalah pelayanan yang akan memudahkan masyarakat mengakses program dan produk dan layanan pemerintah secara online. Pada sisi pemerintah daerah mendapatkan outcome timbal balik atau respon dari masyarakat dengan cepat dan efektif, sehingga teknologi benar-benar bermanfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

3.5 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 98,15% dari total anggaran yang dialokasikan. Anggaran untuk program/kegiatan sasaran utama sebesar 30,5 % dari anggaran belanja langsung, sedangkan untuk program/kegiatan pendukung sebesar 69,5 % dari total anggaran belanja langsung. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya publikasi dan informasi pembangunan

dan kegiatan pemerintahan daerah melalui media massa (99,95 %). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran diperolehnya formulasi sistem pengembangan data dan informasi statistik sektoral secara terkoordinatif (96,41 %).

Tabel 3.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2018

No	Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya publikasi dan informasi pembangunan dan kegiatan Pemerintahan Daerah melalui media massa	10 Media	10 Media	100	3.672.000.000,-	3.670.188.127	99,95
2.	Diperolehnya formulasi sistem pengembangan data dan informasi statistik sektoral secara terkoordinatif	1 Dokumen	1 Dokumen	100	284.000.000,-	273.820.580,-	96,42
3.	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Pemerintahan	30 SKPD/ titik SIM CCTV	43 SKPD/ titik SIM CCTV	140	902.150.000,-	896.825.000,-	99,40
4.	Terbangunnya sarana dan prasarana gedung kantor yang dilengkapi dengan peralatan yang memadai	3,56 % pembangunan tahap awal	3,56 % pembangunan tahap awal	100	2.500.000.000,-	2.448.800.000,-	97,95
5.	Meningkatnya pengembangan dan penyelarasan E-Government melalui optimalisasi pemanfaatan aplikasi teknologi dan informasi	5 aplikasi	5 aplikasi	100	947.450.000,-	929.716.000,-	98,13
Belanja Langsung per Sasaran					8.305.600.000,-	8.219.349.707,-	98,96
Belanja Langsung Pendukung					18.823.111.978,-	18.406.812.576,-	97,79
Belanja Tidak Langsung					9.891.243.678,-	8.728.905.872,-	88,25
Total Belanja					37.019.955.656,-	35.355.067.975,-	95,50

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran kinerja yang relatif *sangat baik* mencapai 108% sementara penyerapan anggaran kurang dari 100%, menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2018 telah mencukupi, dan persentase capaian kinerja melampaui persentase realisasi anggaran.

Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Sasaran Strategis dan yang mendukung sasaran strategis Tahun 2018

NO	PROGRAM	ANGGARAN			KETERANGAN
		Target	Realisasi	% Deviasi	
1	2	3	4	5	6
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.840.721.278,-	4.740.102.711	0,001	
	a. Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat	20.000.000,-	20.000.000,-	0,00	
	b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	320.396.278,-	254.510.140,-	20,56	
	b. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	20.000.000,-	19.984.490,-	0,08	
	d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	120.000.000,-	117.284.500,-	2,26	
	e. Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.542.986.300,-	1.528.176.310,-	0,96	
	f. Penyediaan jasa kebersihan kantor	60.000.000,-	59.999.500,-	0,00	
	g. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100.000.000,-	100.000.000,-	0,00	
	h. Penyediaan alat tulis kantor	80.000.000,-	80.000.000,-	0,00	
	i. Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	70.000.000,-	69.990.000,-	0,01	
	j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.235.229.200,-	1.220.727,-368,-	1,17	
	k. Penyediaan komponen instalasi listrik/ bangunan kantor	100.000.000,-	100.000.000,-	0,00	
	l. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	25.000.000,-	24.880.000,-	0,48	
	m. Penyediaan makanan dan minuman rapat	150.000.000,-	149.995.000,-	0,00	
	n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	425.000.000,-	424.936.986,-	0,01	
	o. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	312.975.000,-	312.975.000,-	0,00	
	p. Biaya pembayaran instruktur senam	20.000.000,-	20.000.000,-	0,00	
	q. Rujukan berobat PNS	30.000.000,-	28.086.292,-	6,38	

	r. Rapat Konsultasi / konsultasi / Rakernis	209.134.500,-	208.557.125,-	0,28	
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APAARATUR	3.243.000.000,-	3.178.642.000,-	1,98	
	a. Pengadaan kendaraan dinas / operasional	568.000.000,-	559.992.000,-	1,41	
	b. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	150.000.000,-	145.850.000,-	2,77	
	c. Pemeliharaan rutin/ berkala pagar, halaman dan tempat parkir	25.000.000,-	24.000.000,-	4,00	
	d. Pembangunan Gedung Smart Province	2.500.000.000,-	2.448.800.000,-	2,05	IKU
3.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	272.750.000,-	261.500.000,-	4,12	
	a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	104.000.000,-	96.750.000,-	6,97	
	b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	64.750.000,-	60.750.000,-	6,18	
	c. Pengadaan pakaian batik	104.000.000,-	104.000.000,-	0,00	
4.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	330.000.000,-	330.000.000,-	0,00	
	a. Pendidikan dan pelatihan teknis	330.000.000,-	330.000.000,-	0,00	
5.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	195.000.000,-	194.917.150,-	0,04	
	a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	75.000.000,-	74.968.250,-	0,04	
	b. Penyusunan dan pelaporan prognosis realisasi anggaran	7.000.000,-	6.949.400,-	0,72	
	c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	30.000.000,-	30.000.000,-	0,00	
	d. Penyusunan RKA SKPD	83.000.000,-	82.999.500,-	0,00	
6.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ASET/ BARANG DAERAH	30.000.000,-	30.000.000,-	0,00	
	a. Pengelolaan inventaris barang daerah	30.000.000,-	30.000.000,-	0,00	
7.	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	7.457.518.800,-	7.389.691.808,-	0,91	
	a. Siaran keliling melalui mobil unit keliling	45.000.000,-	44.781.750,-	0,48	
	b. Pengembangan pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Prov. Kalteng	363.500.000,-	357.314.000,-	1,70	
	c. Pembuatan SIM CCTV terpusat lingkup Pemprov. Kalteng	902.150.000,-	896.825.000,-	0,59	IKU
	d. Pembuatan video profil Kalteng	170.000.000,-	169.289.000,-	0,42	
	e. Pembuatan website Diskominfoantik Prov. kalteng	25.000.000,-	24.730.400,-	1,08	
	f. Expose dan peliputan informasi (Multimedia) pembangunan Pemprov. Kalteng	2.376.200.000,-	2.332.995.527,-	1,82	
	g. Pengadaan dan pemasangan videotron	3.135.200.000,-	3.125.400.000,-	0,31	
	h. Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM)	115.000.000,-	114.999.200,-	0,00	

	i. Diseminasi informasi agenda prioritas pemda dan isu-isu strategis	212.468.800,-	210.368.500,-	0,99	
	j. Koordinasi bidang Informasi publik	73.000.000,-	72.988.531,-	0,02	
	k. Koordinasi bidang komunikasi publik	40.000.000,-	40.000.000,-	0,00	
8.	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	50.000.000,-	40.303.393,-	19,39	
	a. Pembinaan pengelolaan keaktifan domain dan sub domain PPID utama dan pembantu di seluruh PD Pemprov. Kalteng	50.000.000,-	40.303.939,-	19,39	
9.	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	3.847.000.000,-	3.838.330.614,-	0,23	
	a. Sosialisasi dan koordinasi KI Daerah Prov. Kalteng	150.000.000,-	149.444.837,-	0,37	
	b. Pemantauan isu publik, pendapat umum dan aduan masyarakat	25.000.000,-	18.697.650,-	25,21	
	c. Kontrak halaman media cetak	3.672.000.000,-	3.670.188.127,-	0,05	IKU
10.	Program Pengembangan data / informasi	219.692.900,-	219.036.000,-	0,30	
	a. Monitoring dan evaluasi data sarana bidang Kominfosantik	151.612.900,-	151.176.000,-	0,29	
	b. Penyusunan dan evaluasi pelaksanaan RB Diskominfo	68.080.000,-	67.860.000,-	0,32	
11.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN SIMDA (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH)	110.000.000,-	105.980.000,-	3,69	
	a. Pengembangan website Pemda Kalteng	110.000.000,-	105.980.616,-	3,65	
12.	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	5.793.250.000,-	5.583.217.485,-	3,63	
	a. Biaya bandwitch data center	1.105.000.000,-	928.200.000,-	16,00	
	b. Sosialisasi internet sehat	83.500.000,-	83.426.124,-	0,09	
	c. Pemberdayaan Sumber daya komunikasi dan informasi melalui puskom kreatif	100.000.000,-	99.144.956,-	0,86	
	d. Bongkar dan pemasangan perangkat jaringan data center	30.000.000,-	29.400.000,-	2,00	
	e. Peningkatan perangkat jaringan data center	2.041.150.600,-	2.035.579.800,-	0,27	
	f. Pengelolaan multimedia center	984.650.000,-	980.796.500,-	0,39	
	g. Pembuatan RITIK Pemprov. Kalteng	290.549.400,-	290.549.400,-	0,00	
	h. Pengembangan dan Penyelarasan E-Government	947.450.000,-	929.716.000,-	1,87	IKU
	i. Pemanfaatan MCAP	77.500.000,-	75.341.000,-	2,79	
	j. Koordinasi bidang TIK dan Statistik	83.450.000,-	82.527.702,-	1,11	
	k. Koordinasi bidang E-Government	50.000.000,-	48.536.003,-	2,93	
13.	PROGRAM PENYELENGGARAN SOSIALISASI SEMINAR , PUBLIKASI DAN WORKSHOP	211.820.200,-	204.415.200,-	3,50	
	a. Melaksanakan Bimtek , workshop/ seminar mengenai peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan Pemda	86.041.200,-	80.841.200,-	6,04	

	b. Sosialisasi peningkatan tata kelola TIK pemerintah	50.000.000,-	47.829.000,-	4,34	
	c. Publikasi Diskominfoantik pada masyarakat	75.779.000,-	75.745.000,-	0,04	
14,	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI/ STATISTIK DAERAH	284.000.000,-	273.820.580,-	3,58	
	a. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	210.000.000,-	200.039.400,-	4,74	IKU
	b. Pembinaan statistik sektoral	74.000.000,-	73.781.180,-	0,30	IKU
15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERSANDIAN DAERAH	243.958.800,-	236.203.900,-	3,18	
	a. Koordinasi jaringan bidang persandian antar pusat dan daerah	100.000.000,-	95.249.300,-	4,75	
	b. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan persandian pada Pemprov, kab/ kota se Kalteng	110.958.800,-	108.887.600,-	1,87	
	c. Koordinasi bidang keamanan informasi dan persandian	33.000.000,-	32.067.000,-	2,83	
	Total Belanja langsung	27.128.711.978,-	26.626.162.103,-	1,85	

Analisa Efisiensi

Tabel 3.11 Analisa Efisiensi Indikator Kinerja yang Capaiannya $\geq 100\%$

No	Sasaran Startegis	Indikator kinerja	% Capaian Target Kinerja ($\geq 100\%$)	% penyerapan anggaran	% Tingkat efisiensi
1.	Meningkatnya publikasi dan informasi pembangunan dan kegiatan Pemerintahan Daerah melalui media massa	Jumlah media publikasi yang digunakan	100	99,95	0,05
2.	Diperolehnya formulasi sistem pengembangan data dan informasi statistik sektoral secara terkoordinatif	Data sektoral 14 Kabupaten/Kota	100	96,42	3,58
3.	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah SIM CCTV terpusat lingkup Pemprov Kalteng	140	99,40	0,6
4.	Terbangunnya sarana dan prasarana gedung kantor yang dilengkapi dengan peralatan yang memadai	Persentase pembagian tahapan awal	100	97,95	2,05
5.	Meningkatnya pengembangan dan penyelarasan E-Government melalui optimalisasi pemanfaatan aplikasi teknologi dan informasi	Jumlah aplikasi yang diterapkan	100	98,13	1,87

Dari 5 (lima) sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persaandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah capaian kinerja yang lebih dari 100% adalah sasaran Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Pemerintahan. Secara keseluruhan, realisasi fisik dapat terselesaikan atau tercapai 100%. Realisasi keuangan tidak seluruhnya dapat tercapai 100% karena efisiensi nilai pekerjaan dari nilai kontrak yang di bawah pagu Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA).

B_{AB 4}

Penutup

Keberhasilan penyelenggaraan kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak, serta komitmen aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Hasil laporan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 5 (lima) sasaran, terdapat 5 (lima) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2018, 5 (lima) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100% dari keseluruhan indikator.
2. Fungsi penyebarluasan informasi adalah peran strategis untuk menjembatani pesan *timbalbalik* antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Untuk itu dukungan sarana dan prasarana baik infrastruktur kelembagaan maupun teknologi, merupakan suatu keniscayaan.

Sebagai satuan perangkat daerah yang baru dibentuk dan efektif operasional di tahun 2017, beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi :

1. Kelengkapan sarana dan prasarana yang belum memadai, khususnya gedung kantor yang didukung perangkat teknologi yang mumpuni.
2. Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami dan menguasai.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut di atas :

1. Memperkuat anggaran dukungan sarana dan prasarana dan pengadaan perangkat teknologi tepat guna secara selektif dan bersifat urgent;
2. Pengembangan sumber daya manusia melalui bimbingan teknis serta rekrutmen sesuai kebutuhan pegawai.